

Lampiran

: Keputusan Camat Jatilawang Kabupaten Banyumas
tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
Nomor : 480 / 010 / 2023
Tanggal : 1 Februari 2023

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN JATILAWANG, KABUPATEN BANYUMAS**

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Data pribadi penduduk - keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental - sidik jari - iris mata - tanda tangan - elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.	- UU No. 14 Tahun 2008, tentang KIP Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	- Melindungi rahasia pribadi	- Sampai dengan terbitnya Keputusan Mendagri /Gubernur/Bupati/Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk - Persetujuan dari yang bersangkutan
2	Biodata korban kekerasan berbasis gender dan anak	- UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan - UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10	- Mengungkap aib seseorang - Berpotensi pada penyalahgunaan data	- Melindungi hak-hak korban	- Persetujuan dari yang bersangkutan
3	Data by name by address Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	- UU No. 14 Tahun 2008, tentang KIP Pasal 17 huruf h, angka 1, 2, dan 4	- Berpotensi pada penyalahgunaan data	- Melindungi data penerima manfaat	- 5 Tahun
4	Usulan data penduduk penerima Bansos	- UU NO 14 Th 2008 ps 17 huruf h dan i - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84	- Berpotensi pada penyalahgunaan data	- Melindungi data penerima manfaat	- 5 Tahun
5	Memorandum / surat surat yang sifatnya rahasia	- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	- Mengganggu proses penyusunan kebijakan	- Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	- 30 Tahun
6	Disposisi surat pimpinan yang sifatnya rahasia	- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	- Mengganggu proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses pelaksanaan kegiatan	- 30 Tahun
7	Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin - nama pengadu - data ASN yang melanggar - isi laporan	- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	- Mengungkap identitas diri ASN Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah Melanggar HAM	- Melindungi data ASN yang bersifat rahasia	- 5 Tahun
8	Identitas ASN yang akan melakukan perceraian/beristeri lebih dari satu orang	- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	- Mengungkap identitas diri ASN Melanggar HAM	- Melindungi data ASN yang bersifat rahasia	- 5 Tahun

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
9	Data Penilaian SKP ASN	- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	- Mengungkap identitas diri ASN Melanggar HAM	- Melindungi data ASN yang bersifat rahasia	- 5 Tahun
10	SK Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi kerahasiaan dokumen	- Sampai dengan tanggal berlakunya SK atau pelantikan
11	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian dan Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi kerahasiaan dokumen	- 30 Tahun
12	Data Usulan Mutasi PNS	- UUD Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	- 30 Tahun
13	Dokumen Pengelolaan Keuangan	- UU No. 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	- Berpotensi pada penyalahgunaan data	- Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	- 30 Tahun
14	Laporan Keuangan Perangkat Daerah (yang belum diaudit)	- UU No. 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	- Berpotensi pada penyalahgunaan data	- Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	- Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
15	Dokumen Nota/Laporan Hasil Pengawasan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	- Berpotensi pada penyalahgunaan data	- Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	- 30 Tahun
16	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	- Berpotensi pada penyalahgunaan data	- Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	- 30 Tahun

CAMAT JATILAWANG,
R. DIAN ANDIYONO L.S.

